

PRAKTIK *GOVERNANCE* YANG TERMEDIATISASI: ANALISIS MULTIMODAL PADA *CHANNEL* YOUTUBE @*BIDANGKEBUDAYAAN* MILIK DISPARBUDPORA KABUPATEN SUMEDANG

Ulfah Aristia Tresna Gunawan

Kajian Budaya dan Media, Universitas Gadjah Mada
ulfaharistiatresnagunawan@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini berfokus menelaah bagaimana praktik *governance* yang dimediasasi secara visual menjadi produk digital yang didistribusikan melalui media sosial, konten video tidak hanya didudukan sebagai instrumen komunikasi dan arsiparis publik, namun menjadi produk visual yang berkelindan dengan *logika platform* yang sebelumnya tidak ada dalam logika birokrasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif, analisis dilakukan terhadap salah satu video yang terdapat dalam platform YouTube milik Bidang Kebudayaan Disparbudpora Kabupaten Sumedang dengan menggunakan metode multimodal. Hasil penelitian ini menunjukkan keterhubungan yang penting antara moda verbal dan visual dalam video yang saling membangun makna institusional. Moda verbal hadir dalam bentuk tertulis dan lisan, di mana teks tertulis berfungsi menegaskan otoritas administratif dan dominasi institusional. Sementara moda verbal lisan digunakan oleh aktor tertentu untuk menggerakkan narasi utama. Sementara moda visual berperan memvalidasi kehadiran aktor institusional di lapangan, namun video cenderung beroperasi sebagai performa apresiasi institusi alih-alih ruang dialogis terbuka.

Keyword: Mediasasi, *Governance*, Video

1. PENDAHULUAN

Pergeseran habitus dalam berkomunikasi yang menjadi semakin terdigitalisasi membawa pengaruh besar terhadap dimensi kehidupan bermasyarakat. Merujuk pada *tempo.co* (2025) eksistensi media sosial mengalami transformasi signifikan secara global yang mencangkup pertumbuhan jumlah pengguna, evolusi platform serta dampaknya terhadap bidang sosial dan ekonomi. Kondisi ini mengharuskan pemerintah mengambil tindakan cepat untuk terus melakukan transformasi pelayanan publik ke dalam kanal informasi teknologi digital, salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan media sosial. Selaras dengan apa yang dijelaskan Apandi (2020, dalam Sangaji & Irianto 2025) digitalisasi layanan publik dapat merujuk pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Implementasinya dapat melibatkan pemanfaatan berbagai platform digital seperti situs web, aplikasi seluler, media sosial, dan layanan pesan instan. Pemanfaatan media sosial bukan hanya sebuah *tren*, lebih dari itu dapat menjadi kebutuhan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai alat yang dapat memfasilitasi komunikasi dua arah, media sosial dapat menghubungkan agenda pemerintah dengan masyarakat luas, bahkan menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antara instansi pemerintah daerah dengan masyarakat yang dilayani (Mubarok, 2022 dalam Supriyanto et al., 2024). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penggunaan media sosial juga menjadi bentuk dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menjadi wujud transformasi digital yang mengintegrasikan aktivitas penyampaian informasi secara konvensional ke dalam bentuk-bentuk digital (Fansuri et al., 2024).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya, media sosial dapat menjadi instrumen penting yang mendorong transparansi dan akuntabilitas publik, harapannya masyarakat dapat terlibat dalam membantu mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan masukan, saran, dan bahkan kritikan yang membangun bagi pembangunan daerahnya (Paribrata, 2017; Suryani, 2017 dalam Fansuri et al., 2024). Sebelum masifnya penggunaan media sosial, pemerintah daerah hanya memiliki ruang publik fisik, namun kini media sosial menjadi infrastruktur digital yang membentuk ruang keterlibatan masyarakat secara langsung. Hal ini dapat mengantisipasi kesenjangan yang terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta berpeluang membentuk hubungan yang lebih kolaboratif dan inklusif (Supriyanto et al., 2024). Kesadaran pemerintah untuk turut mengoptimalkan media sosial bahkan telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Pemerintah. Kebijakan tersebut ditetapkan untuk memberikan acuan dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan media sosial di instansi pemerintah. Hal ini semakin mempertegas bagaimana peranan media sosial dewasa ini telah menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, mengingat bahwa media sosial bukan sekedar teknologi komunikasi yang dapat memberikan efektifitas dan efisiensi, namun dapat menjadi ruang publik yang dikonstruksi oleh teknologi jaringan,

menjadi medium yang mengubah cara masyarakat berdemokrasi, mampu memindahkan pertukaran informasi dan diskusi secara fisik ke dalam ruang yang dibuat oleh algoritma (Boyd, 2010).

Kabupaten Sumedang menjadi salah satu daerah yang aktif memperkuat pengimplementasian SPBE guna mendorong reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan public berbasis digital (*sumedangkab.go.id*, 2026). Komitmen tersebut menjadikan Kabupaten Sumedang menjadi salah satu pemerintah daerah yang terbukti unggul dalam inovasi-inovasi layanan digital (Wijaya, 2023 dalam Barsei et al., 2023).

Tidak hanya bagian humas pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang, bahkan beberapa organisasi perangkat daerah seperti Disparbudpora cukup aktif dalam memanfaatkan media sosial sebagai medium komunikasi publik. Jika ditelusuri, Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga atau Disparbudpora Kabupaten Sumedang memiliki lebih dari satu akun media sosial dengan format yang berbeda, mulai dari eksistensinya di platform Instagram, Facebook hingga YouTube. Dalam hal ini, media sosial memiliki banyak peluang yang dapat dimanfaatkan, selain menjadi sarana program pemasaran pariwisata, promosi *event* dan kegiatan, media sosial dapat menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan *influencer* sebagai pihak eksternal (Etin et al., 2024) dalam membantu mendorong terjadinya strategi pemasaran yang dapat mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan. Hal tersebut memperlihatkan bagaimana media sosial mampu menggeser sekat birokrasi yang kaku secara lebih mudah, sementara masyarakat memiliki akses yang besar dalam melihat apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Adapun dari beberapa akun media sosial yang dikelola oleh Disparbudpora Kabupaten Sumedang, platform YouTube menjadi menarik untuk dieksplorasi lebih dalam, terlebih lagi bahwa pada praktiknya, Bidang Kebudayaan melakukan pemanfaatan platform YouTube secara aktif.

Tidak dapat dipungkiri bahwa “*YouTube was increasingly one of several mainstream social media platforms on which universities, businesses, and government departments generally could be expected to have a presence.*” (Burgess & Green, 2018). Di era digital, peranan media sosial seperti YouTube dapat menjadi ekspektasi publik, jika sebuah instansi pemerintahan tidak mengoptimalkan media sosial, maka berpeluang memunculkan keraguan publik yang mempertanyakan transparansi atau profesionalisme instansi. Namun dalam hal ini, optimasi YouTube yang dilakukan khusus oleh Bidang Kebudayaan juga memperlihatkan bahwa proses *mediatization of governance* tidak berlangsung secara bersamaan dalam sebuah institusi, melainkan muncul melalui praktik-praktik spesifik pada bidang tertentu yang memiliki kebutuhan tinggi akan dokumentasi visual di ruang digital. Bidang Kebudayaan memiliki keselarasan dengan kebutuhan representasional yang spesifik pada praktik kebudayaan, hal ini terlihat dari karakteristik kerjanya yang bertumpu terhadap visualitas. Mulai dari objek kesenian, artefak, cagar budaya, pertunjukan hingga proses ritual acap kali bersifat performatif dan kurang lengkap jika hanya sekedar direpresentasikan melalui teks atau gambar statis, sehingga YouTube sebagai platform berbasis audio-visual dapat menjadi ruang ideal dalam mendistribusikan informasi, edukasi bahkan promosi.

Optimalisasi akun YouTube @KEBUDAYAANSUMEDANG milik Bidang Kebudayaan (Disparbudpora) Kabupaten Sumedang terbilang cukup konsisten dalam memproduksi konten video, hal ini terlihat dari kuantitasnya yang telah diunggah sejak tahun 2019. Menurut data akun tersebut memiliki 94 video dengan total 319,389 tayangan dan telah berhasil mendapatkan 3.005 subscribers (data diambil pada tanggal 27 Januari 2025), meskipun frekuensinya masih rendah namun terdapat langkah strategis dalam pengoptimalan konten secara berkala melalui berbagai video yang dikemas secara bervariasi, seperti yang terdapat dalam *Playlists* khusus meliputi— Film Dokumenter Sumedang, Video Klip Sumedang, *Event* Sumedang, Wayang Golek Sumedang dan Pertunjukan Seni Sumedang. Sementara video lainnya seperti Film Pendek hingga Video Dokumentasi Budaya yang menampilkan ekspedisi ke beberapa tempat-tempat bersejarah di Kabupaten Sumedang. Produk konten yang termuat dalam akun YouTube tersebut tidak hanya menjadi tontonan, melainkan menjadi ruang interaksi yang dapat menghadirkan forum diskusi, dalam hal ini teknologi jaringan mengubah konten audio-visual menjadi jaringan sosial lewat fitur teknis yang disediakan oleh platform.

Mengacu pada perspektif Boyd (2010), meski banyak orang seringkali menganggap YouTube sebagai ruang kumpulan video. YouTube sangat memenuhi kriteria sebagai *social network site* dan menjadi bagian dari *networked publics* yang memenuhi empat kriteria— yakni *persistence*, *visibility*, *spreadability* dan *searchability*. Dengan kemampuan *persistence*, video yang diunggah dapat disimpan hingga ditonton secara berulang sebagai arsip digital, sebagaimana akun YouTube @KEBUDAYAANSUMEDANG sebagai media arsip kreatif yang berpeluang menjadi medium pelestarian, di mana visualisasi sejarah dan budaya dapat hidup melalui upaya digitalisasi, menjadi arsip yang dapat tersimpan untuk generasi mendatang. *Visibility*, memungkinkan video yang diunggah di YouTube dapat dilihat oleh jutaan orang, tidak sekadar masyarakat Sumedang namun juga memungkinkan menjangkau masyarakat lain di luar wilayah Kabupaten Sumedang. *Spreadability*, memungkinkan video didistribusikan dengan mudah secara lintas-platform, YouTube sendiri dirancang dengan fitur-fitur *link*, *share* dan kode HTML yang menciptakan penyebaran konten ke platform lain, hal ini mendorong keterlibatan *engagement* dan jaringan penonton yang lebih luas. Sedangkan

searchability berarti dalam platform YouTube siapa pun bisa mencari konten, topik hingga informasi dengan mudah, melalui akun YouTube yang dikelola oleh Bidang Kebudayaan Disparbudpora Kabupaten Sumedang, masyarakat bisa melihat gambaran agenda, program kerja hingga capaian strategis Bidang Kebudayaan yang termediasi melalui konten-konten audio-visual.

Penelitian terkait pemanfaatan media sosial sebagai praktik digitalisasi atau *e-governance* sudah banyak dilakukan, namun penelitian yang melihat konten arsip dokumentasi budaya sebagai bagian dari praktik kinerja pemerintahan yang dimediasasi masih relatif terbatas, terutama analisis terkait produk digital berbasis video yang didistribusikan melalui platform YouTube. Dalam konsep *mediatization* (Couldry & Hepp, 2017) realitas sosial seperti produk-produk kebudayaan mengalami transformasi komunikatif dan proses sosial, di mana tidak hanya terjadi pada cara penyampaian pesan, namun juga perubahan pada praktik sosial. Ketergantungan pada media sebagai infrastruktur menjadi media tidak lagi dilihat sebagai medium perantara komunikasi semata, lebih dari itu adalah fondasi realitas sosial yang membentuk cara aktor di dalamnya, termasuk instansi pemerintah bertindak, berhubungan dan menegosiasikan makna. Dalam hal ini, video dalam akun YouTube @KEBUDAYAANSUMEDANG menjadi manifestasi dari *Mediatization of Governance*, pelaksanaan pemerintahan tidak hanya dijalankan secara administratif, tetapi juga dikonstruksi melalui praktik representasi performatif yang kerap berkelindan dengan logika platform. Ketika instansi pemerintahan seperti Disparbudpora Bidang Kebudayaan Kabupaten Sumedang memilih platform YouTube untuk dioptimalisasi, maka konten-konten yang diunggah di dalamnya tidak akan terlepas dari *guiding logic* platform yang tidak ada dalam logika birokrasi sebelumnya. Melalui mediatisasi, Bidang Kebudayaan tidak hanya menjadi bukti kerja nyata namun ikut mempertunjukkan kinerjanya lewat visibilitas digital, sehingga konten video sebagai produk mediatisasi bukanlah sesuatu yang netral. Korthagen dan Klijn (2014) bahwa "*media do not neutrally transmit information, but, like all institutions, shape and select information in certain ways*" (Altheide and Snow 1979, Mazzoleni and Schulz 1999, Cook 2005, Parkinson 2006), konten yang didistribusikan melalui media menjadi hasil seleksi yang membentuk representasi *governance* yang memusatkan pada figurasi tertentu.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan melakukan analisis terhadap salah satu video yang terdapat dalam platform YouTube Kebudayaan Sumedang, sebuah media kreatif dan arsip video bidang kebudayaan disparbudpora Kab. Sumedang dengan memfokuskan analisis pada konten video dokumentasi kebudayaan yang berjudul "*DISCOVERY: Columnar Joint – GUNUNG SUSURU Sumedang*", diunggah pada 3 Oktober 2025 dengan total durasi 8:46 menit. Pemilihan objek penelitian ini didasari pada pengemasan konten yang secara eksplisit menunjukkan adanya upaya mediatisasi atas performa kehadiran kinerja pemerintah Bidang Kebudayaan Disparbudpora Kabupaten Sumedang yang berkelindan dengan logika platform YouTube, selain itu pemilihan konten tersebut juga tidak lepas dari pertimbangan pemilihan *engagement*, meskipun tingkat *engagement* konten tersebut tidak tergolong tinggi namun cukup menonjol jika dibandingkan dengan konten lainnya yang serupa (konten dengan muatan kunjungan warisan budaya) pada akun yang sama. *Engagement* yang diperoleh meliputi— 808 tayangan, terdapat 53 *likes* dan 5 komentar yang menunjukkan masih mengindikasikan adanya interaksi dari audiens. Kendati demikian, *engagement* pada konten tersebut tidak menjadi indikator utama yang menentukan penelitian, namun hal ini tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan objek karena menandakan kecukupan dalam menarik perhatian dan pemaknaan pesan oleh audiens. Teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui observasi daring melalui teknik simak catat yang menyimak penggunaan bahasa dan visual secara cermat, selain itu teknik studi pustaka juga dilakukan guna mengumpulkan data melalui penelaahan literatur, buku, catatan hingga berita yang relevan dengan topik penelitian.

Konten video yang terdapat dalam platform YouTube kaya akan visual dan narasi, kondisi ini selaras dengan penjelasan Denzin & Lincoln (2018), bahwa terdapat berbagai jenis data empiris yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, diantaranya narasi, teks budaya hingga materi visual. Adapun penelitian kualitatif terletak secara situasional dan kontekstual, terdiri dari serangkaian interpretatif yang membuat sesuatu menjadi tampak, dalam hal ini posisi peneliti tidak hanya melihat realitas namun mengubah cara realitas itu dipahami. Adapun penelitian ini akan menggunakan metode multimodal dengan melakukan analisis mendalam pada aspek visual, audio, teks dan struktur konten guna membaca representasi serta praktik produksi, sebagaimana dikembangkan oleh Kress (2010) dalam konsep multimodal, setiap moda melakukan *division of semiotic labour* atau pembagian kerja semiotik berbeda yang di orkestrasi untuk memproduksi makna tertentu. Landasan konsep multimodalitas ini dapat menafsirkan dan memahami data visual maupun non-visual secara simultan, guna mengkaji berbagai moda komunikasi melalui gambar (diam atau bergerak), video, audio serta material tiga dimensi (Dicks, 2019 sebagaimana dikutip dalam Fazeli et.al, 2023).

Melalui pembacaan ini, analisis dilakukan guna mengungkap bagaimana konten video yang dibentuk melalui unsur moda seperti verbal, visual dan audio yang diunggah dalam platform YouTube merefleksikan

konsep *mediatization of governance*, di mana kinerja dan kehadiran pemerintahan bidang kebudayaan dimediasi serta diarsipkan secara terbuka melalui orkestrasi multimodal. Di mana terdapat moda dalam konten video yang saling menjalankan fungsinya secara spesifik, meski setiap moda memiliki kekuatan dan keterbatasannya masing-masing, sebagaimana gambar dapat memperlihatkan apa yang membutuhkan waktu lama jika harus di baca, sementara teks atau narasi dapat menamai apa yang sulit ditampilkan secara visual (Kress, 2010). Hal ini menjadi penting karena dalam komunikasi manusia tidak pernah sepenuhnya dalam moda verbal, sebab ada gestur, visual, hingga material yang menyertainya, sementara platform YouTube membuat visibilitas multimodalitas menjadi lebih terlihat, praktik komunikasi dalam hal pelaksanaan pemerintahan yang sebelumnya berlangsung di belakang layar, kini menjadi terekspos dan terencana karena direkam, ditampilkan ulang hingga diedarkan secara publik menjadi objek representasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebuah konten dapat dipahami sebagai produk komunikasi yang tidak bersifat netral, melainkan dihasilkan melalui proses produksi makna yang dikonstruksi oleh aktor pembuatnya dan kerap bersinggungan dengan logika platform tertentu. Guna menganalisis konten video, analisis tidak cukup dengan hanya membaca narasi dan teks verbal semata, sebab konten video juga tersusun melalui berbagai moda di dalamnya, termasuk visual dan audio. Sehingga mengacu pada konsep Kress (2010), video yang termuat dalam akun YouTube @KEBUDAYAANSUMEDANG dapat dipahami sebagai teks multimodal yang setiap modanya memiliki potensi semiotik berbeda yang bekerja untuk saling memproduksi makna. Video konten “**DISCOVERY: Columnar Joint – GUNUNG SUSURU Sumedang**” (link akses: <https://www.youtube.com/watch?v=PK0hNVzMk8M>) dengan durasi 8 menit lebih ini, secara konsep memuat pendokumentasian tindak lanjut lapangan terhadap situs temuan columnar joint yang berada di Gunung Susuru, Dusun Sahang, Desa Dayeuh Luhur, Kecamatan Ganeas. columnar joint atau biasa disebut kekar tiang merupakan struktur khas yang umum dijumpai pada batuan basal tetapi kadang kadang juga terdapat pada batuan beku jenis lainnya. Struktur batu ini disebabkan karena adanya pendinginan dan penyusutan merata dalam magma, biasanya dicirikan dengan perkembangan empat, lima, atau enam sisi prisma dan kemungkinan juga dipotong oleh retakan yang melintang (Suryawan et al., 2018).

Video yang dipublikasikan melalui akun YouTube @KEBUDAYAANSUMEDANG milik Bidang Kebudayaan tersebut menampilkan kehadiran langsung Kepala Bidang Kebudayaan beserta Kepala Desa Dayeuh Luhur, Kadus Saheng serta Masyarakat Dusun Sahang Kombinasi dalam konten video tersebut juga terbentuk melalui proses penyuntingan video yang ditambahkan *teks, backsound, opening* hingga *credit* di akhir videonya. Hal ini menunjukkan bahwa video dokumentasi budaya oleh Bidang Kebudayaan Disparbudpora tidak ditampilkan dalam keadaan mentah, melainkan hadir melalui konstruksi yang berkelindan dengan logika platform. Penyuntingan sendiri bukan sekadar tahap akhir dalam proses pembuatan video, namun juga menjadi bentuk negosiasi instruksi resmi dari ekosistem YouTube, sebagaimana rekomendasi yang tercantum dalam YouTube Help melalui *Creator Tips* bahwasannya pengeditan adalah upaya sadar yang dirancang untuk menghasilkan video yang baik dan menjadi strategi dalam menarik reaksi audiens. Sehingga Bidang Kebudayaan sebagai aktor *designer* yang memproduksi video konten tersebut, sejatinya telah melakukan orkestrasi berbagai moda dengan mekanismenya yang ditentukan oleh *affordance* teknologi.

3.1. Moda Verbal (Bahasa)

3.1.1 Verbal Tertulis (*written discourse*)

Dalam video, moda verbal muncul berupa verbal tertulis (*written discourse*) dan verbal lisan (*spoken discourse*), di mana keduanya hadir dengan fungsinya masing-masing. Beberapa verbal tertulis yang ditemukan dalam video diantaranya teks opening berupa tipografi, teks titik lokasi perjalanan, teks lokasi hingga credit di akhir video.



Gambar 1. Teks Opening Konten Video “DISCOVERY: Columnar Joint – GUNUNG SUSURU Sumedang”

Dalam konten video yang didistribusikan secara luas melalui YouTube, konten tidak hanya menjadi arsip digital yang pasif, namun eksistensinya hadir untuk mendapat atensi yang lebih besar dari audiens. Opening dalam video merupakan cuplikan pertama yang dapat meningkatkan profesionalisme video, teks dalam opening dapat berfungsi sekaligus untuk menekankan arah kepada audiens tentang apa yang akan mereka tonton. Sebagaimana penganalogian teks yang diposisikan seperti *pearls on a string* (Kress, 2010). Teks yang ada dalam opening sebagai moda verbal tertulis bekerja secara linier, menjadi kerangka yang mengarahkan isi penyayangan video konten tersebut yang sejak awal telah menentukan arah pemaknaan. Dalam teks “Columnar Joint - Gunung Susuru Sumedang” yang dimunculkan di awal video, semakin menegaskan bahwa video tersebut akan mengangkat sebuah objek budaya yang terdapat di Gunung Susuru Sumedang, teks memberi identitas sebagaimana tindak lanjut lapangan yang dilakukan Bidang Kebudayaan untuk menilik situs columnar joint. Adapun dalam teks ‘Columnar Joint’ yang dihadirkan tidak ditampilkan melalui penulisan teks biasa, namun teks hadir melalui teknik tipografi yang menonjolkan *pattern* bebatuan guna mengekspresikan nuansa dan topik dari isi konten tersebut. Dilansir melalui telkomuniversity.ac.id (2023). Teknik tipografi tidak sekedar untuk memperhitungkan penampilan dan kesan visual semata, namun juga turut memperhatikan aspek daya tarik, pemahaman pembaca serta maksud pesan yang ingin disampaikan.



Gambar 2. Teks Lower-Third yang Muncul dalam Layar

Teks tertulis juga muncul melalui teknik *lower-third* yang ditempatkan pada bagian bawah layar video, teknik ini menjadi penanda yang memberikan informasi identitas pada siapa saja yang berbicara. Sebagaimana ditegaskan Purnomo & Islami (2023) teknik *lower-third* bertujuan untuk memberikan manfaat bagaimana cara menambahkan serta memberikan informasi tambahan tanpa mendistraksi visual utama, melalui *lower-third* pula aktor yang berbicara dalam konten video dapat diketahui identitasnya seperti nama dan jabatan yang dimilikinya, tanpa harus memperkenalkan diri secara. Teks yang muncul melalui *lower-third* tersebut diantaranya Suhadi S. Kom sebagai Jafung Bidang Kebudayaan Disparbudpora Kab. Sumedang, Moh. Budi Akbar, S. Sok sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Disparbudpora Kab. Sumedang, serta Eman Senin Sutisna sebagai Kepala Desa Ganeas. Dalam observasi yang penulis temukan, penjabaran teks ‘Kepada Desa Ganeas’ di dalam video seharusnya merujuk pada ‘Kepada Desa Dayeuhluhur’ tempat di mana objek columnar joint ditemukan. Menurut laporan portal *inisumedang.com* (Arif, 2005) disebutkan bahwa nama Eman Senin Sutisna yang juga muncul dalam *lower-third* merupakan seorang Kepala Desa Dayeuhluhur. Sehingga hal ini dapat menjadi indikasi bahwa dalam konten video tersebut tidak luput dari kesalahan teknis. Mengingat bahwa Desa Ganeas maupun Desa Dayeuhluhur merupakan dua wilayah administratif yang memiliki dua kepala desa berbeda. Dalam konteks pelaksanaan pemerintahan yang dimediatasi, konten video yang didistribusikan dalam platform YouTube tidak hanya menjadi produk komunikasi semata, sehingga diskrepansi data seperti

penyebutan identitas kepada desa dapat berimplikasi pada profesionalisme representasional institusi itu sendiri. Dalam orkestrasi multimodal, identitas Kepala Desa Dayeuhluhur menjadi penting sebagai representasi yang mewakili warga Dayeuhluhur yang menjadi objek ditemukannya *columnar joint*, sehingga proses konstruksi pula penting untuk memerhatikan akurasi, sementara itu nama Dayeuhluhur tetap ditegaskan dalam setiap narasi video.

Terlepas dari itu, secara implisit konstruksi ini menunjukkan bagaimana kehadiran teks *lower-third* memperlihatkan siapa saja yang hadir dan diberikan *agency* untuk bersuara, ketiganya sama-sama menjadi aktor birokrasi yang dapat mewakili ‘suara institusi’. Kabid dan Staff mewakili pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, sementara itu Kepala Desa memiliki peranan yang sentral dalam tata kelola pemerintahan desa, secara administratif ia merupakan pemimpin eksekutif dalam ruang lingkup desa. Dalam konteks mediatisasi, posisinya menjadi strategis sebagai pemberi validasi atas agenda tindak lanjut lapangan yang dilakukan Bidang Kebudayaan sebagai wakil pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, sekaligus menjadi bentuk sinergitas diantara kedua instansi tersebut. Dalam hubungan birokrasi, pemerintah desa dan Disparbudpora memiliki peranan vital yang berfokus pada kemitraan strategis dalam pengembangan potensi lokal, sebagaimana *columnar joint* yang disinyalir dapat menjadi sebuah potensi dalam video tersebut.

Sementara itu, penulis tidak menemukan teks *lower-third* yang muncul untuk memberi identitas pada beberapa orang lainnya atau warga sekitar yang turut menemukan *columnar joint* di daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa konten video tersebut dikonstruksi dengan menampilkan siapa yang berbicara dan dapat validasi melalui praktik identifikasi dalam bentuk moda verbal, sekaligus secara implisit menunjukkan siapa saja yang hadir namun tidak bertindak untuk memberikan suaranya. Dalam bentuk mediatisasi (Couldry & Hepp 2010) memungkinkan terjadinya pemberian *agency* kepada figurasi tertentu dari orang dan institusi, dengan memberi mereka peluang-peluang khusus dalam konstruksi dunia sosial sekaligus membatasi *agency* dari pihak-pihak lainnya. Bentuk mediatisasi ini menentukan kapasitas dalam mengonstruksi realitas sosial yang dikenali dan dimaknai melalui konten video yang terdapat dalam platform YouTube. Melalui kehadiran *lower-third* penulis dapat mengidentifikasi bagaimana ketiga aktor tersebut hadir tidak hanya bertindak untuk memberikan suara namun juga diberikan identitas dan makna yang dapat diidentifikasi secara mudah oleh audiens, *agency* yang dimiliki ketiga aktor tersebut juga memberi legitimasi peran yang menentukan otoritas suara, serta menstabilkan posisi bahwa apa yang sedang dibicarakan menjadi sumber penting. Dalam konten video tersebut *lower-third* bukan sekadar teks kecil yang memberikan identitas seseorang, namun juga memperkuat *agency* institusional dalam memproduksi *voice*, sebagaimana mengacu pada Couldry (2010) yang memandang *voice* sebagai bentuk *reflexive agency*, dalam konteks multimodal, moda verbal tertulis berfungsi sebagai sarana artikulasi *voice* yang mengarahkan audiens untuk membaca ketiga aktor tersebut bukan lagi sebagai individu biasa, melainkan sebagai representasi negara yang dan mendapatkan legitimasi sah dari struktur pemerintahan.



Gambar 3. Teks sebagai Otoritas Administatif

Dalam konten video, ditemukan teks yang hadir sebagai representasi otoritas administratif yang dapat memberi makna dan konteks geografis secara langsung. Eksistensi teks yang muncul beriringan dengan grafis saling bekerja sama dalam memberikan *agency* pada lokasi tersebut. Tanpa adanya teks yang jelas, audiens akan cukup kesulitan untuk memahami kemunculan *icon location* hingga garis konektor yang meliuk-liuk berwarna putih, sementara itu dengan bantuan visual di belakangnya audiens hanya akan melihat bundaran jalan dengan spot mahkota binokasih. Ketika teks penamaan itu dimunculkan, maka audiens akan lebih mudah memahami bahwa bagian konten tersebut menunjukkan titik keberangkatan hingga titik tujuan dari agenda tindak lanjut lapangan yang dilakukan Bidang Kebudayaan. Teks ‘Sumedang Kota’ mengindikasikan titik awal perjalanan, sebuah ruang yang mengacu pada pusat pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang, di mana dalam ruang tersebut menjadi tempat Disparbudpora Kabupaten Sumedang berada, posisi ini turut memastikan bahwa

inisiatif berangkat dari koordinasi formal pemerintahan yang terletak di Kota Sumedang. Sementara itu teks ‘Gunung Susuru’ mengindikasikan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Sumedang yang menjadi titik tujuan dalam video tersebut. Teks ini memberikan penanda penting yang semakin menegaskan bahwa Gunung Susuru menjadi tempat ditemukannya objek *columnar joint*. Selanjutnya teks juga hadir untuk mempertegas keterangan terkait lokasi dengan lengkap dan spesifik. Moda verbal tertulis yang hadir bertugas dalam memberikan presisi administratif, sehingga tanpa kehadirannya, audiens hanya akan melihat gambaran perjalanan dinas melalui moda visual semata. Eksistensi teks ini dapat menjadi instrumen kontekstual spasial yang memberikan legitimasi faktual yang dapat meningkatkan kebenaran informasi yang disampaikan melalui konten video. Namun temuan mengenai ketidaksesuaian identitas Kepala Desa (dalam gambar 2) menunjukkan adanya kontradiksi, di satu sisi video konten berusaha tampil presisi secara lokasi, namun di sisi lain terjadi kesalahan teknis yang menyebabkan pelemahan validitas narasi.



Gambar 4. Teks Credit

Moda verbal tertulis muncul pula di bagian akhir berupa credit. Dalam hal ini, credit tidak semata-mata hadir sebagai pelengkap yang dapat menghindari pelanggaran Hak Cipta semata namun juga memberikan fungsi simbolik yang lebih luas. Teks “Dokumentasi Arsip Bidang Kebudayaan Disparbudpora Kabupaten Sumedang Tahun 2025” menjadi penegasan dominasi institusional yang memperlihatkan bagaimana mediatisasi dilakukan secara langsung oleh Bidang Kebudayaan, instansi mengkonstruksi temuan *columnar joint* bukan hanya sebagai temuan warga, namun menjadi arsip penting bagi pemerintah daerah. Arsip tersebut pula dapat menjadi bukti konkrit bagaimana agenda tindak lanjut lapangan termediatisasi sebagai validasi kerja Bidang Kebudayaan. Di era digital, media memegang peranan penting dalam sebuah instansi pemerintahan, sehingga tata kelola mengadaptasi ritme kerja media dengan mengembangkan formatnya. Meski birokrasi tertulis tetap ada namun tidak dipungkiri bentuk pengemasannya menjadi lebih bervariasi, sebagaimana arsip dokumentasi Bidang Kebudayaan yang dibuat menjadi konten video yang dapat didistribusikan secara luas melalui platform YouTube. Tindakan pemerintah yang dimediatisasi tersebut memungkinkan untuk mendapat makna dan legitimasi dari publik, Sebagaimana proses historis sebelumnya bahwa peredaran dokumentasi tertulis mengubah praktik pemerintahan untuk berinteraksi dengan wilayahnya kekuasaannya (Couldry & Hepp, 2017), bentuk-bentuk *governance* yang semakin termediatisasi dewasa ini, seperti konten video arsip dokumentasi Bidang Kebudayaan Disparbudpora Kabupaten Sumedang yang juga mengubah cara bagaimana otoritas ditunjukkan, keterlibatan partisipasi hingga representasi ditampilkan.

Lebih lanjut, dalam credit tersebut tidak ditemukan daftar seluruh tim di balik layar yang berkontribusi dalam pembuatan konten video tersebut. Meski umum terjadi, ketidakcantuman identitas tim pencipta dalam credit tetap memunculkan risiko dari sisi etika yang perlu dipertimbangkan. Selain memiliki fungsi sebagai stempel, credit juga menjadi bagian penting sebagai ruang pengakuan dan apresiasi terbuka kepada seluruh tim yang terlibat dalam proses kreatif pembuatan video konten. mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014, sejatinya pencipta yang terlibat dalam pembuatan karya memiliki hak moral untuk dicantumkan namanya. Meski tim di belakangnya terafiliasi dengan instansi Disparbudpora, namun hak moral tetap melekat pada individu di baliknya meski terdapat hubungan kerja di dalamnya. Dalam konsep mediatisasi (Couldry & Hepp, 2017) credit dapat dilihat sebagai bentuk simbolik pengakuan *agency*, tim produksi di balik layar secara faktual menunjukkan kolektivitas kerja, mereka ada dalam praktik namun tidak diberikan pengakuan secara simbolik. Sementara itu sentralitas instansi pemerintahan yang dihadirkan dalam credit menunjukkan sebagai aktor tunggal, sementara tim di belakang layar absen secara simbolik, sehingga credit tersebut menunjukkan adanya penyeragaman representasi simbolik dimana *agency* tim produksi diringkas ke dalam satu subjek kolektif.

3.1.2 Verbal Lisan (*spoken discourse*)

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya melalui teks *lower-third* (data: gambar 2) terlihat hanya ada tiga aktor yang muncul untuk berbicara sehingga moda verbal lisan hanya muncul dari ketiga aktor tersebut. Secara keseluruhan teknik komunikasi yang dikemas dalam konten video bukanlah dalam bentuk wawancara dialogis, melainkan dalam bentuk monolog yang terorkestrasi, ketiganya tidak melakukan dialog satu sama lain, melainkan menyampaikan narasi pembicaraan langsung secara bergantian. Dalam konten video tersebut terdapat kontruksi representasi naratif dari setiap masing-masing aktor dengan menyampaikan pesan yang berbeda dan terstruktur, memberikan kesan bagaimana ketiganya menjalankan fungsi birokrasi yang saling melengkapi dalam membangun citra pemerintahan yang responsif.

Narasi yang Muncul Sebagai *Triggering Event*

Pada bagian awal, narasi verbal lisan dihadirkan lewat Jafung Bidang Kebudayaan Disparbudpora Kab. Sumedang. Aktor dalam bagian ini menjadi perpanjangan tangan instansi yang membuktikan bahwa pemerintah telah hadir sebelum dilaksanakannya tindak lanjut lapangan yang dimediasi secara matang melalui verifikasi awal yang juga dimediasi, sekaligus memvalidasi temuan awal dari objek *columnar joint* di Gunung Susuru. Hal ini selaras dari narasi yang disampaikan “... izin pimpinan melaporkan, hari ini saya berada di gunung susuru... ditemukan lempengan batu yang cukup besar...”, kemudian narasi tersebut dilanjutkan dengan harapan agar apa yang telah menjadi temuan tersebut dapat segera ditindak lanjuti oleh pihak-pihak terkait, seperti Kabid Kebudayaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Dalam konten video yang dikonstruksi sebagai hasil dari mediatisasi, penempatan narasi di bagian di awal sekaligus memberikan justifikasi teknis yang dapat menjadi *triggering event*, di mana agenda tindak lanjut lapangan menjadi agenda responsif yang dilakukan Bidang Kebudayaan untuk merealisasikan apa yang telah disampaikan oleh Jafung Bidang Kebudayaan tersebut. Mengacu pada Couldry & Hepp (2017) bahwa “*certain forms of mediatization offer agency to certain figurations... while limiting the agency of others.*”, dalam hal ini aktor tetap mendapat *agency* namun muncul dari posisi relasionalnya dalam figurasi yang dimediasi meski dalam koridor yang terbatas, ia berperan dalam menonjolkan bagaimana pemerintah tampak hadir dengan membawa data lapangan, narasinya menggerakkan cerita dalam konten video namun tetap ada batasan secara simbolik, *agency*-nya cukup untuk melakukan validasi, namun tidak mendapatkan klaim otoritas untuk menjelaskan keseluruhan narasi dalam konten video.

Narasi Kolaboratif & Performatif

Dalam konten video tersebut, Kepala Bidang Kebudayaan memegang peranan penting sebagai narator yang menunjukkan kehadiran pemerintah daerah, ia menjadi aktor sentral yang memiliki otoritas dalam mewakili narasi pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang. Narasinya awalnya yang dibuka dengan “... hari ini Bidang Kebudayaan berada di Gunung Susuru, Dusun Sahang, Desa Dayeuhluhur, Kec. Ganeas” tidak hanya merepresentasikan bentuk laporan, namun juga menunjukkan performa pemerintahan yang responsif dengan mengubah temuan warga atas *columnar joint* menjadi agenda resmi pemerintahan. Terdapat narasi sinergitas juga disampaikan secara langsung melalui pernyataan “... kami didampingi oleh Pak Kades beserta beberapa tokoh masyarakat, ada Pak Kadus, Pak RT..” hal ini menunjukkan bahwa dalam konten video pemerintahan daerah dalam agendanya kerap bersinggungan dengan tokoh-tokoh lokal dengan turut serta dimediasi. Kehadiran tokoh masyarakat ini bukan sekadar formalitas koordinasi, namun berperan sebagai fungsi strategis yang sangat krusial dalam birokrasi pemerintahan, tanpa adanya masyarakat lokal yang tampil dalam layar maka agenda tindak lanjut dapat dianggap sebagai tindakan invasi yang tidak melibatkan masyarakat setempat. . Sehingga masyarakat yang ikut dihadirkan semakin memperkuat validasi pembangunan yang partisipatif, meski beberapa tokoh masyarakat seperti Pak Kadus, Pak RT ataupun masyarakat di sekitarnya absen dalam moda verbal karena tidak menampilkan posisi untuk berbicara. Kolaboratif yang ditunjukkan juga menjadi upaya dalam mengimplementasikan *good governance* sebagaimana terimplementasi dari narasi yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Kebudayaan “...kami juga berkomitmen dengan Pak Kades dan masyarakat untuk sama-sama menjaga tinggalan geologi ini dan bukan hanya tinggalan geologi tapi tinggalan biologi dan budaya yang ada di khususnya di Desa Dayeuhluhur, umumnya di Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang...”.

Sebagai aktor sentral, Kepala Bidang Kebudayaan memperoleh *agency* interpretatif melalui figurasi praktik yang termediatisasi, ia menjadi pembawa narasi yang tidak hanya melaporkan, namun juga mengarahkan cara publik memahami realitas budaya dengan menjelaskan dan membongkai makna dari objek *columnar joint*, ketika narasi tersebut dimediasi dalam bentuk konten video, maka kapasitas dan kredibilitasnya sebagai pemimpin berpeluang diakui secara publik. Sebagai contoh, penjelasan muncul melalui konteks yang menjelaskan *history value* dari objek yang bersangkutan “*ada columnar joint atau terbentuk dulunya itu lahar dingin yang mengeras menjadi batu, yang dimungkinkan ini di zaman tersier pernah ada gunung merapi purba*

di sini sekitar mungkin 20-60 juta tahun yang lalu..” lebih lanjut ia juga mendeskripsikan bagaimana objek yang terdapat di Gunung Susuru memiliki keunikannya tersendiri karena posisinya yang miring jika dibandingkan secara ilmiah dengan tempat lain. Narasi yang disampaikan tersebut melalui konten video, secara tidak langsung dapat menjadi bukti performativitas visual yang menunjukkan kompetensinya dalam berkomunikasi. Kompetensi tersebut merujuk pada bagaimana seorang pemimpin publik dalam menyampaikan ide, sikap, nilai-nilai kepada pegawainya, salah satunya melalui penyampaian informasi (Suliyadi, 2018). Ketika praktik tersebut dimediasasi melalui platform YouTube, penyampaian informasi tidak terbatas pada ruang internal birokrasi, namun juga sasarannya tertuju kepada audiens publik yang lebih luas.

Selain itu, narasi performatif juga ditunjukkan sebagai upaya revolusioner juga muncul melalui moda verbal lisan. Columnar joint dibingkai memiliki nilai yang unik, langka dan dikagumi, sehingga objek tersebut bukan lagi sebagai benda mati tanpa makna, namun juga menjadi aset yang berpotensi bagi Kabupaten Sumedang “... *struktur batu ini juga mudah-mudahan bisa ikut memperkuat juga harapan Kabupaten Sumedang untuk dijadikan kawasan geopark...*”. Visi tersebut juga diperkuat dengan upaya perealisasiannya melalui narasi yang mengindikasikan mobilisasi sumber data intelektual, hal ini menunjukkan pengakuan dan keterbatasan bahwa Bidang Kebudayaan tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan visi dalam menciptakan kawasan geopark di Kabupaten Sumedang, meski memiliki otoritas administratif namun pemerintah tidak memiliki otoritas secara epistemik, agar temuan tersebut mendapatkan legitimasi secara ilmiah maka kehadiran para ahli dan akademisi memegang peranan penting. Dalam hal ini, mediatisasi yang didistribusikan melalui platform YouTube dapat bertransformasi menjadi katalisator inklusif di mana undangan atau ajakan disampaikan secara terbuka.

Narasi Legitimasi Penutup

Kepala desa melalui narasi yang disampaikannya menjadi aktor yang berperan dalam memberikan legitimasi dan apresiasi terhadap tindak lanjut lapangan yang dilakukan oleh Bidang Kebudayaan Disparbudpora Kabupaten Sumedang, munculnya moda verbal lisan melalui Kepala Desa pula kemudian menegaskan sinergitas yang tidak hanya diklaim dari pihak Bidang Kebudayaan sebagai wakil pemerintah daerah, namun juga terverifikasi dari sisi masyarakat setempat yang diwakilkan oleh kepala desa, hal ini tercermin dari ungkapannya “*Intinya saya berterima kasih sudah sigap ini dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Sumedang untuk mengunjungi tempat ini. Mudah-mudahan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sumedang terus maju dan mudahan-mudahan Kabupaten Sumedang terus maju juga, menjadi icon tentang temuan-temuan purbakala yang ada di Kabupaten Sumedang.*”. Meski diberikan ruang untuk berbicara namun dalam kerangka figurasi yang termediatisasi ia mendapat *agency* yang berbeda dengan aktor sentral yang dapat menafsirkan objek columnar joint secara mandiri, representasi posisi Kepala Desa dalam video konten hanya berbicara untuk menyampaikan harapan dan ungkapan terima kasih. Adapun narasi harapannya tersebut dibuktikan dengan penyampaian narasinya “*mudah-mudahan dengan adanya temuan ini, Kabupaten Sumedang pada umumnya, khususnya untuk Desa Dayeuhluhur, Kecamatan Ganeas bisa menjadi suatu tempat wisata ke depannya...*”. Sementara itu narasi Kepala Desa tersebut yang diletakan di urutan akhir vidio merupakan hasil kontruksi yang mengorkestrasi narasi secara terstruktur dengan membangun logika aksi-reaksi— di mana pemerintah datang, hadir dan membawa visi kemudian masyarakat setempat yang diwakilkan kepala desa memberikan apresiasi dan menaruh harapannya.

3.2. Moda Visual (Gambar)

3.1.2 Visual (Gambar)

Gambar menjadi komponen dasar video yang tidak dapat dipisahkan, kehadirannya dapat menangkap satu momen dengan moda yang seolah-olah hidup dan bergerak. Video YouTube menjadi konten yang sangat mengandalkan visualitas. Dalam konsep multimodal, visual memiliki kapasitas semiotiknya sendiri dalam membangun makna dengan bekerja berdampingan bersama moda verbal (Couldry & Hepp, 2017). Dalam mediatisasi tindak lanjut lapangan yang menjadi agenda Bidang Kebudayaan, visual tidak hanya sekadar menampilkan estetika namun juga bekerja sebagai praktik sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam moda verbal sebelumnya, saat ketiga aktor berbicara, visual yang hadir menampilkan fisik ketiganya, meski dalam beberapa bagian tidak berada dalam satu bingkai yang sama, tanpa adanya visual yang dihadirkan, audiens tidak dapat melihat dan memaknai bagaimana gambaran ketiga aktor tersebut, seperti cara komunikasinya melalui bahasa tubuh hingga ekspresinya ketika berbicara.



Gambar 5. Sample Visual Asimetris Relasi Kuasa dalam *Frame*

Konten video menunjukkan bahwa aktor yang berbicara pasti akan mendapat ruang dalam bingkai, sehingga dapat dipastikan bahwa Kepala Bidang Budaya sebagai aktor sentral dalam konten tersebut lebih banyak mendapatkan sorotan dibandingkan aktor lainnya. Sementara itu, beberapa tokoh masyarakat dan warga sekitar yang terlihat, tidak absen secara visual, namun eksistensinya menjadi subjek yang pasif, mereka tertangkap kamera namun hanya sebagai pelengkap. Dalam studi media, visual menjadi mekanisme seleksi yang dapat mengkonstruksi siapa dan apa yang mendapat ruang di mata publik. Kamera secara konsisten memberikan banyak sorotan melalui teknik pengambilan *close-up* hingga *full body* terhadap kehadiran Kepala Bidang Kebudayaan. Butler (sebagaimana dikutip dalam Couldry, 2003) mengungkapkan bahwa proses materialisasi memungkinkan beberapa jenis *voice* muncul sebagai "*possible*" (dianggap ada) dan yang lain tidak (dianggap tidak ada). *Voice* dalam dimensi visual bukan sekadar tentang siapa yang berbicara dan tertangkap kamera, melainkan tentang siapa yang identitasnya divalidasi oleh bingkai tersebut. Kendati kepala desa dimunculkan dalam sorotan tertentu guna mewakili masyarakat sekitar dalam kerangka administratif, sejatinya ia tidak memiliki kendali penuh atas bingkai visual maupun arah dokumentasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktik mediatisasi *voice* dari masyarakat setempat tidak sepenuhnya dihilangkan, namun dimediasi dan dibatasi melalui konstruksi logika produksi media, mereka hadir dalam bingkai, namun tidak memiliki *agency*.

Asimetris relasi kuasa dalam *frame* tidak bisa dilepaskan dari praktik mediatisasi yang tunduk pada logika produksi media, sehingga kondisi ini rentan memunculkan ketimpangan yang hanya menjadikan subjek lainnya sebagai alat penanda ruang, bahwa lokasi itu nyata sekaligus menempatkan masyarakat dalam bingkai visual guna memvalidasi klaim 'laporan warga' yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan dalam konten video tersebut secara langsung. Sehingga konten video yang menjadi produk mediatisasi *governance* tersebut lebih cenderung bersifat performa-apresiasi, alih-alih deliberatif yang menghadirkan dokumentasi dialogis terbuka terhadap semua subjek yang dimunculkan di dalam bingkai dan membuka kemungkinan suara alternatif, teknik komunikasi yang terlihat pun menjadi monolog yang terorkestrasi. Ketika kamera hanya memberi sorotan khusus pada siapa yang berbicara, visual bukan hanya keputusan estetika, namun menjadi bagian dari *media process* yang menstabilkan siapa yang berbicara dan relevan untuk mendapatkan sorotan khusus dalam bingkai



Gambar 6. Sample Visual *B-Roll*

Selain pengemasan visual yang menampilkan subjek berbicara secara langsung ke kamera, penulis menemukan pula beberapa moda visual non-verbal berupa cuplikan video sisipan yang banyak dihadirkan untuk memperkaya konteks cerita dan menjadi daya tarik visual, seperti rekaman perjalanan, pemandangan alam, hingga detail objek temuan columnar joint. Dalam praktik produksi audiovisual, elemen visual pendukung yang dimunculkan dalam konten video dikenal dengan istilah *b-roll*. Elemen ini biasa hadir terutama dalam konten non-fiksi seperti berita, dokumenter dan *reality show*, sebagaimana yang ditemukan dalam konten video *b-roll* ditampilkan sebagai *cutaway* pada jalur gambar ketika audio narasi tetap berjalan (Bowen, 2018), gambar (6) menjadi *sample data* yang menunjukkan adanya penyisipan elemen visual *b-roll* dengan menampilkan detail objek columnar joint, visual ini memegang peranan krusial yang dapat memberikan legitimasi narasi terkait informasi columnar joint yang dipaparkan oleh Kepala Bidang Kebudayaan. Tanpa adanya elemen *b-roll*, konten akan menjadi kaku dan kehilangan kesan narasi yang relevan dan kontekstual, sehingga peranannya tidak hanya menambah nilai estetika semata.

Variasi teknik pengambilan gambar yang hadir dalam elemen *b-roll* pula sangat beragam, tidak hanya menggunakan teknik pengambilan gambar melalui *tight shot* atau *long shot* namun juga menghasilkan visual yang memperlihatkan fotografi udara melalui teknologi drone. Dalam konteks video tindak lanjut lapangan, penggunaan drone dilakukan untuk menampilkan gambaran luas dari objek lokasi tempat columnar joint berada, yakni di Gunung Susuru. Ketika video hanya menampilkan narasi monolog aktor-aktor dalam konten video, maka dokumentasi hanya akan menjadi visual yang mentah, tanpa memberikan ruang visual yang proporsional bagi objek columnar joint dan lokasi Gunung Susuru itu sendiri, akibatnya audiens hanya disuguhkan redundansi visual yang memicu kejenuhan. Hal ini menunjukkan, konten video sebagai produk mediatisasi *governance* berkelindan dengan logika platform, praktik komunikasi institusional harus menyesuaikan diri, beberapa elemen *b-roll* yang hadir konten video menjadi praktik bagaimana figurasi *governance* bernegosiasi dengan logika platform. Dalam hal ini video tidak hanya sekadar menyampaikan informasi terkait agenda tindak lanjut lapangan, namun mengonstruksikan menjadi semenarik mungkin, sehingga dapat memenuhi ekspektasi konsumsi dengan menyesuaikan audiens sebagai individu yang memproses realitas secara visual.

4. KESIMPULAN

Dari penelitian ini ditemukan, bahwasannya video dengan judul “**DISCOVERY: Columnar Joint – GUNUNG SUSURU Sumedang**” sebagai dokumentasi arsip Bidang Kebudayaan memuat moda yang saling terhubung—beberapa moda verbal dihadirkan untuk menunjukkan otoritas administratif dan penegasan dominasi institusional oleh Bidang Kebudayaan. Selain itu moda verbal yang menggerakkan konten video hadir melalui narasi tiga aktor yang muncul dalam konten video tersebut, meliputi Jafung Bidang Kebudayaan Disparbudpora Kabupaten Sumedang, Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Sumedang dan Kepala Desa Dayeuhluhur yang memiliki *agency* berbeda sebagai efek dari figurasi *governance* yang termediatisasi. Adapun moda visual berperan penting dalam menguatkan validasi konkrit atas kehadiran aktor ketiganya di lapangan, melalui kerja sama moda-moda tersebut, konten video dapat berpotensi membangun citra atas kinerja Bidang Kebudayaan yang responsif dan kolaboratif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa video tersebut cenderung bersifat performa-apresiasi, bukan dialogis terbuka yang hadir memunculkan suara alternatif. Agenda tindak lanjut lapangan yang di klaim sebagai bentuk laporan warga, justru tidak menampilkan interdependensi yang aktif antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat sebagai pihak pelapor atas objek columnar joint tersebut.

Sementara itu, konten video sebagai praktik kinerja pemerintahan yang dimediatisasi sejatinya tidak berperan sebagai *database* internal semata, namun juga didistribusikan melalui YouTube yang berkelindan dengan logika platform, sehingga praktik kinerja yang termediatisasi menjadi orkestrasi yang tidak netral. Melalui ruang media sosial, Bidang Kebudayaan tidak hanya berperan sebagai pelayan publik, namun juga berperan sebagai kurator realitas yang turut membentuk cara *governance* dipahami dan dialami sebagai realitas visual. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pendistribusian arsip dokumentasi agenda tindak lanjut lapangan yang memanfaatkan platform YouTube, dapat menjadi manifestasi dari inovasi pelayanan publik di era digitalisasi. Praktik ini dapat berkontribusi dalam memberikan nilai transparansi yang berpeluang menjadi ruang publik digital, di mana masyarakat bisa mengakses arsip kinerja Kebudayaan Daerah secara lebih mudah, sekaligus menjadi bentuk edukasi yang efektif dalam mengenalkan potensi daerah berupa objek columnar joint.

REFERENCES

- Barsei, A. N., Nugroho, S. A., Ghassani, G. A., & Trianita, L. N. (2023). Inovasi Digital pada Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Mendorong Open Government. *Matra Pembaruan*, 7(2), 99–110. <https://doi.org/10.21787/mp.7.2.2023.99-110>
- Bowen, C. J. (2018). *Grammar of the edit*. Routledge.
- Boyd, Danah. (2010). "Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications." In *Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social Network Sites* (ed. Zizi Papacharissi), pp. 39-58.
- Burgess, Jean., & Green, Joshua. (2018). *YouTube: online video and participatory culture*. Polity Press.
- Couldry, & Hepp. (2017). *Mediated Construction of Reality: Society, Culture, Mediatization*. Polity Press.
- Couldry, Nick. (2010). *Why voice matters: culture and politics after neoliberalism*. SAGE.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research*. SAGE.
- Fansuri, H., Sartika, I., Ismiyanto, D., Pendayagunaan, K., Negara, A., & Birokrasi, R. (2024). *Inovasi Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah: Studi pada Tingkat Kementerian/Lembaga*. <https://doi.org/10.33701/jmb.v6i1.4235>
- Fazeli, S., Sabetti, J., & Ferrari, M. (2023). Performing Qualitative Content Analysis of Video Data in Social Sciences and Medicine: The Visual-Verbal Video Analysis Method. *International Journal of Qualitative Methods*, 22. <https://doi.org/10.1177/16094069231185452>
- Fitriyah, N., & Suliyadi, A. (2018). Membangun kompetensi pemimpin dalam mengelola organisasi publik: Strategi dan aplikasi. *Madani*, 10(1), 79–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/madani.v10i1.941>
- Kress, G. (2009). Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication. In *Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication*. Routledge Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9780203970034>
- Marliyana, P. (2026, 6 Januari). *Sumedang berhasil membangun ekosistem pemerintahan digital*. Pemerintah Kabupaten Sumedang. <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/sumedang-berhasil-membangun-ekosistem-pemerintahan-digital>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.
- Republik Indonesia. (2018). *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182.
- Sangaji, M. S. J., & Irianto, J. (2025). Transformasi Inovasi Pelayanan Publik menuju Pemerintahan Digital. *Jejaring Administrasi Publik*, 17(1), 54–70. <https://doi.org/10.20473/jap.v17i1.72708>
- Silvia Wandanita Etin, Gilang Pratama Putra, & Tedi Supriadi. (2024). Strategi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang dalam Upaya Mewujudkan Sumedang Sebagai Kabupaten Pariwisata. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(12). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i12.4928>
- Suryawan, G., Fadhila, M. F., & Muslim, D. (2018, 5–6 September). Penilaian kualitas batuan berdasarkan metode SSR dan RMR serta aplikasinya terhadap kegiatan pertambangan pada area columnar joint di daerah Pasanggahan, Sumedang. Dalam *Perspektif Ilmu Kebumihan dalam Kajian Bencana Geologi di Indonesia: Proceeding Seminar Nasional Kebumihan Ke-11*. Grha Sabha Pramana, Yogyakarta.
- Supriyanto, D., & Noegroho, A. (n.d.). Media Sosial dalam Efektivitas Komunikasi Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Daerah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 7796–7810.